

ANALISIS PENGARUH PDRB, INFLASI, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN EKS KARISIDENAN PATI TAHUN 2012 - 2018

Dimas Priyono¹
Herniwati Retno Handayani

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

dimaspriyono@students.undip.ac.id

Abstract

Regional economic development is an important indicator for analyzing a growth in an area. In this case the local government and the community manage existing resources and form a partnership pattern between the private sector and local governments. This will create new jobs and stimulating the development of economic activity in the region. PAD as a regional revenue reflects the level of regional independence.

The study aims to analyze the effect of GRDP, Inflation, Total Population on local revenue in Pati Ex-Residency using quantitative methods of secondary data from 2012 - 2018. Using panel data from cross section data of 5 districts time series data from 2012 to 2018 in the former Karisidenan Pati District the most suitable method is the Fixed Effect Model.

The result shows that GDRP, Inflation, Total Population have a positive and significant effect on local revenue, Total Population has the highest influence. Simultaneous test results show that the variables of GRDP, Inflation, Total Population simultaneously have a significant effect on Regional Original Income. When these variables can be optimized, the economic activity in Pati Ex-Residency will develop well.

Keywords: PDRB, Inflation, Total Population, local revenue

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia merupakan suatu upaya peningkatan semua aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan dalam sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berbagai upaya pembangunan nasional diarahkan menuju pemerataan pembangunan di setiap daerah yang cenderung penerimaan pendapatannya masih lemah sehingga mengurangi kesenjangan antar daerah. Otonomi daerah merupakan program pemerintah yang bertujuan memobilisasi sumber daya secara mandiri untuk meningkatkan pembangunan daerah (Arsyad, 1999).

¹ *Corresponding Author*

Desentralisasi fiskal ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah menerima pelimpahan kewenangan serta penyerahan sumber-sumber dan bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Desentralisasi diatur dalam Undang – Undang (UU) No. 25 tahun 1999 yang berisi tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian disempurnakan dalam Nomor 33 Tahun 2004 yang didalamnya pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana hasil pajak/bukan pajak, lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam mengurus atau menjalankan sistem pemerintahan dukungan keuangan merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Dukungan keuangan tersebut dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola atau menjalankan kegiatan rumah tangga Berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota pada era sistem desentralisasi fiskal dalam menyelenggarakan administrasi dan pembangunan belum mampu menunjukkan kemandirian dalam pembiayaan anggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya porsi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2018

Tabel 1
Data Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa tengah Tahun 2012 – 2018

Tahun	Dana Perimbangan			Total Dana Perimbangan	% Terhadap Pendapatan Daerah
	DAK	DAU	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak		
2012	50.630.450	1.516.892.951	751.282.698	2.318.806.099	50,40%
2013	82.522.510	1.670.859.369	714.432.750	2.467.814.629	54,10%
2014	79.165.240	1.803.931.189	659.530.316	2.542.626.745	59,60%
2015	57.972.640	1.629.429.283	569.741.071	2.257.142.994	74,60%
2016	5.263.717.151	1.859.907.223	893.673.221	8.017.297.595	24,50%
2017	6.566.890.000	3.652.586.000	848.310.000	11.067.786.000	21,40%
2018	6.511.740.000	3.652.586.000	769.450.000	10.933.776.000	22,60%

Sumber: (BPS, 2018), diolah.

Data Tabel 1 menunjukkan jumlah realisasi dana perimbangan masih sangat tinggi dan jumlahnya setiap tahun mengalami kenaikan. Dana Perimbangan merupakan dana yang disumbangkan dari pemerinth pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk digunakan dalam pembiayaan administrasi dan pembangunan. Dengan tingginya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat hal ini mengindikasikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah kabupaten/kota masih rendah,. Menurut (Asmuruf, 2015) potensi (PAD) merupakan kekuatan suatu daerah dalam menghasilkan penerimaan /modal daerah. Berikut Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 – 2018.

Tabel 2
Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Eks
Karisidenan Pati Tahun 2012 – 2018 (Rupiah)

Tahun	Data PAD di Kabupaten eks karisidenan Pati				
	Jejara	Kudus	Pati	Blora	Rembang
2012	129.076.570	113.622.250	163.733.666	81.987.007	102.727.487
2013	133.778.055	144.995.092	169.127.416	95.186.717	126.808.084
2014	231.673.059	234.073.383	173.223.183	116.800.000	139.991.163
2015	270.251.582	259.295.913	428.374.750	94.178.145	182.191.199
2016	219.091.687	274.923.909	267.966.240	208.168.641	180.807.679
2017	325.530.346	103.935.000	428.374.750	289.042.019	215.135.074
2018	369.000.000	324.000.000	384.000.000	191.752.934	280.000.000

Sumber: (BPS, 2018), diolah.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa PAD kabupaten eks Karisidenan Pati pada periode 2012 sampai 2018 berfluktuasi. PAD total terendah selama 7 tahun berada di Kabupaten Blora dengan jumlah total Rp. 1.077.115.463 disusul Kabupaten Rembang sebesar Rp. 1.227.660.686. Hal ini dikarenakan ada beberapa masalah yang dihadapi dalam hal optimalisasi PAD yaitu: Kesadaran sebagian wajib pajak dan retribusi masih rendah dalam memenuhi kewajibannya, belum optimalnya kinerja pada unit-unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih relatif rendah serta keterbatasan SDM pengelola pendapatan.

Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Blora di kabupaten eks Karisidenan Pati persoalannya juga hampir sama, tetapi dalam Tabel 2 secara umum PAD pada tahun-tahun sekarang mengalami kenaikan meskipun tidak optimal hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah kabupaten dalam menangani persoalan dalam optimalisasi PAD.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi PAD yaitu kebijakan dan kelembagaan yang dapat diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri, antara lain kondisi awal suatu daerah, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengadaan pembangunan baru, mencari sumber pendapatan baru, perubahan peraturan dan penyesuaian tarif. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu perkembangan Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, tingkat Inflasi. Daerah yang memiliki perkembangan PDRB yang baik, jumlah penduduk yang produktif serta laju inflasi yang terkendali berdampak pula pada perolehan PAD yang potensial.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU no 23 tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yaitu semua barang dan jasa sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik ditambah pendapatan dari faktor-faktor produksi yang diterima dari luar daerah dikurangi oleh pendapatan dari faktor-faktor produksi yang dibayarkan di luar daerah, terlepas dari apakah faktor-faktor produksi berasal dari atau tidak dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik dari wilayah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul dari kegiatan produksi merupakan pendapatan domestik. Menentukan PDRB ada empat pendekatan, yaitu, pendekatan produksi, Pendekatan pendapatan, Metode alokasi. Dalam pandangan Adam Smith inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan populasi (Todaro, 2002). Dimana modal dan kemampuan pertumbuhan penduduk yang produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penilaian pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), di antaranya adalah bahwa PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan produksi dalam perekonomian (Mankiw, 2003).

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan harga naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga hanya satu atau dua barang tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas ke (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang lain. Inflasi dapat terjadi karena permintaan publik untuk berbagai barang terlalu kuat. Inflasi ini disebut inflasi demand inflation juga dapat terjadi karena biaya produksi naik, ini disebut cost inflasi (Sukirno, 2004). Menurut Samuelson dan Nordhaus, inflasi dapat dilihat dari tingkat derajat yaitu:

1. Inflasi Moderat (Moderat Inflation)
2. Inflasi Ganas (Gallopung Inflation)
3. Hiperinflasi

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Dalam teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula pertumbuhan

jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah (Siskawati, 2014).

Fungsi Pemerintah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Tjandra & Darsono, 2009).

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini dalam hal fiskal. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dibagi menjadi provinsi dan kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Ada tiga variasi desentralisasi fiskal terkait dengan tingkat independensi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah yaitu: desentralisasi, delegasi, devolusi (Bird & Vaillancourt, 2000).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah, internet dan berbagai sumber terkait. Jenis data penelitian ini menggunakan data panel. Gabungan *cross section* dan *time series* tahun 2012-2018 kabupaten eks Karisidenan Pati dengan daerah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora.

Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian ini menggunakan data berdasarkan PAD kabupaten eks Karisidenan Pati tahun 2012-2018. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk mengumpulkan sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang terpisah dan pendapatan PAD yang sah lainnya dan dalam penelitian ini menggunakan satuan rupiah.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan ekonomi di semua wilayah dalam periode tahun tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 di kabupaten eks Karisidenan Pati tahun 2012-2018, yaitu total nilai produksi dari pendapatan yang dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2010. Diukur dengan satuan rupiah per tahun.

3. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini di kabupaten eks Karisidenan Pati tahun 2012-2018 dengan menggunakan CPI yaitu mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam satu periode dengan persentase per tahun.

4. Jumlah Penduduk

Penelitian ini menggunakan data berdasarkan Jumlah Penduduk di kabupaten eks Karisidenan Pati tahun 2012-2018. Jumlah Penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia baik di kota maupun kabupaten selama 6 bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap dan dalam penelitian ini Jumlah Penduduk diukur dengan satuan orang.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series* (Ghozali, 2009). Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut:

$$\log PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PDRB_{it} + \beta_2 LI_{it} + \beta_3 \log JP_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y_{it} = Pendapatan Asli Daerah
- PDRB_{it} = PDRB ADHK
- LI_{it} = Laju Inflasi
- JP_{it} = Jumlah Penduduk
- β₀ = Konstanta
- β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi
- e_{it} = Standar error
- i = Entitas ke-i
- t = Periode ke-t

Pemilihan Model terbaik

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dipilih model terbaik untuk digunakan analisis model yang digunakan adalah model regresi *fixed effect*. Pendekatan efek tetap ini menambahkan variable boneka (*dummy variabel*) ke dalam model untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda – beda baik lintas unit *cross section* maupun antar waktu (Widarjono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Deteksi Asumsi Klasik

Berdasarkan Deteksi Normalitas didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.304706, Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas > 5% sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Hasil deteksi autokorelasi tidak terdapat masalah autokorelasi karena nilai p dari nilai Obs*R-squared 0.4699 yang lebih besar dari 0,05. Hasil deteksi multikolinieritas menunjukkan hasil regresi yang nilai koefisien korelasi lebih besar dari (0,8). Sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak ada multikolinieritas. Berdasarkan Uji Glesjer, nilai Probabilitas dari semua variabel independen menunjukkan prob lebih dari 0,05. maka dapat

disimpulkan bahwa semua variabel independen yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Analisis Regresi

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-66.92873	18.46405	-3.624813	0.0012
LOG(PDRB?)	2.579264	0.403320	6.395084	0.0000
LI?	0.048241	0.018935	2.547789	0.0168
LOG(JP?)	3.077930	1.534077	2.006372	0.0469
Fixed Effects (Cross)				
R-squared	0.810822	Mean dependent var	19.07409	
Adjusted R-squared	0.761775	S.D. dependent var	0.464229	
S.E. of regression	0.226582	Akaike info criterion	0.066213	
Sum squared resid	1.386165	Schwarz criterion	0.421721	
Log likelihood	6.841279	Hannan-Quinn criter.	0.188934	
F-statistic	16.53177	Durbin-Watson stat	2.502834	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi linear berganda maka didapatkan persamaan regresi dari Tabel 3 sebagai berikut:

$$\text{LogPADit} = -66.92873 + 2.579264\text{LogPDRB} + 0.048241\text{LI} + 3.077930\text{LogJP} + \epsilon \text{it} \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan hasil regresi model fixed effect diperoleh nilai koefisien sebesar 0.761775 dimana dikatakan layak atau kuat suatu model jika nilai Adjusted R-squared lebih besar dari pada 0,50 dan besaran sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 76,17% Sedangkan sisanya 23,83% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau tidak. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai statistik sebesar 16.53177 dengan probabilitas statistik F sebesar $0.000000 < \alpha 5\%$ yang berarti H_0 ditolak. Variabel bebas yaitu PDRB, Inflasi dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien 2.579264 yang berarti PDRB berpengaruh signifikan. terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks

Karisidenan Pati, dengan koefisien regresi bertanda positif artinya jika PDRB meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Begitu pula jika PDRB menurun maka tingkat pendapatan asli daerah akan turun. Dalam hal ini semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula permintaan akan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan penelitiannya (Anggara dkk., 2017) menjelaskan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD yang disebabkan karena PDRB adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat ekonomi di suatu daerah. Ketika pendapatan perkapita suatu daerah tinggi maka sumber potensi penerimaan daerah semakin besar yang akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak meningkat sehingga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien 0.048241 yang artinya pada saat inflasi suatu daerah mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat. Hal ini karena Inflasi menekankan pada pengaruh kenaikan upah terhadap jumlah uang beredar sebagai penyebab utamanya, dan biasanya dikatakan terdapat dua jalur antara jumlah uang beredar atau inflasi karena kelebihan Pasokan uang. Tingkat inflasi yang besar sangat mempengaruhi kondisi ekonomi, jika tingkat inflasi tinggi maka akan mempengaruhi daya beli konsumen. Inflasi juga dapat memengaruhi peningkatan PAD, yang penentuannya didasarkan pada omset penjualan, seperti pajak hotel dan pajak restoran (Abdullah & Halim, 2003). Ketika inflasi tinggi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil bergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja dan sebaliknya ketika inflasi menurun, pelaku bisnis cenderung menaikkan harga yang membuat nilai upah riil turun.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa variabel ukuran penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien 3.077930. Hal ini berarti semakin bertambahnya jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat. Sehingga ketika di suatu daerah Jumlah penduduk mengalami peningkatan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah, dengan asumsi penduduk di daerah tersebut selalu produktif, sehingga mampu membayar pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitiannya (Batik, 2013) dengan banyaknya Jumlah Penduduk akan menambah pendapatan suatu daerah, karena ketika Jumlah Penduduk banyak semakin besar jumlah pungutan/iuran seperti pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, semua itu tergantung bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menata, mengontrol dan mengelola semuanya secara produktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab terdahulu temuan empiris dari penelitian ini adalah:

1. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati.
2. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati.
3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati.

4. Variabel independen yaitu PDRB, Inflasi dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yang berarti semakin tinggi nilai PDRB maka akan berpengaruh terhadap banyaknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Mempertimbangkan bagi pemerintah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan nilai PDRB melalui produk-produk unggulan daerah masing-masing atau sektor-sektor. sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang berarti memiliki kewenangan mengatur keuangan di daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Dari hasil penelitian variabel Laju Inflasi berpengaruh positif terhadap PAD. Ketika Laju Inflasi naik maka akan meningkatkan PAD yang satuannya didasarkan pada omset penjualan seperti pajak hotel dan pajak restoran. Tetapi terlepas dari hal tersebut ketika Laju Inflasi terlalu tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun. Maka dari itu perlu peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang merupakan naungan dari Bank Indonesia. Agar Laju Inflasi menjadi stabil, pada saat Laju Inflasi stabil maka akan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang stabil akan memudahkan pengambilan keputusan masyarakat dalam konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Dari hasil penelitian variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. ketika di suatu daerah jumlah populasi mengalami peningkatan itu berdampak positif pada penerimaan PAD dengan asumsi bahwa populasi di daerah itu selalu produktif, sehingga mereka mampu membayar pajak dan retribusi yang dipungut pemerintah, tetapi bahaya ketika pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah karena keadaan miskin dari banyak penduduk yang tidak produktif, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dalam hal tersebut pemerintah perlu melakukan kebijakan – kebijakan yang arahnya pada pertumbuhan penduduk/demografi, dan melakukan *controlling* pada usia angkatan kerja.

REFERENSI

- Abdullah, S., & Halim, A. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi V(1)*, 16-17.
- Anggara, M., Basri, S., & Setiawan, D. (2017). Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 898–912.

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE).
- Asmuruf, M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 727-737.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2018*. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 125-147.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mankiw, N. G. (2003). *Macroeconomics*: New York: Worth Publishers.
- Siskawati, N. (2014). Pagaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Paradigma Ekonomi*, 9(2), 197-206.
- Sukirno, S. (2004). *Teori pengantar makro ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. R., & Darsono, K. B. (2009). *Legislative Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Todaro, M. P. (2002). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Triani, T., & Kuntari, Y. (2010). Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET*, 12(1), 36584.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.